

## Politisi Demokrat Tanya Langsung ke Jokowi soal Reshuffle Kabinet



**BAMBANG SOESATYO**  
Ketua MPR

**BOGOR (IM)** - Pimpinan MPR RI bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat (PD) Syarif Hasan, sempat bertanya seputar reshuffle kabinet kepada Jokowi.

"Tadi Pak Syarif Hasan juga menyampaikan soal reshuffle. Presiden menyampaikan bahwa ini adalah masih kewenangan beliau, nanti akan... Jadi tidak tahu apakah reshuffle atau tidak," ujar Ketua MPR Bambang Soesatyo selepas pertemuan, Rabu (8/7).

PD sejauh ini tidak bergabung dalam parpol koalisi pemerintah. Isu reshuffle sendiri sudah diredam Mensesneg Pratikno yang merupakan orang kepercayaan Jokowi.

Saat ditanya soal reshuffle,

Syarief mengungkapkan bahwa Jokowi ingin kabinetnya bekerja maksimal. Syarif tidak menjelaskan lebih lanjut apakah reshuffle akan dilakukan dalam waktu dekat ini.

"Secara implisit bapak presiden mengatakan menginginkan kabinet ini bekerja maksimal. Secara implisit begitu. Jadi silakan diartikan. Saya pikir itu," ujar Syarif.

Isu reshuffle sempat hangat saat Jokowi menegur jajaran kabinet yang tak punya sense of crisis pada Sidang Kabinet Paripurna 18 Juni 2020. Sejak video beredar, Jokowi dianggap memberikan sinyal kuat reshuffle, bahkan beredar beberapa isu liar soal bocoran reshuffle kabinet.

Isu ini langsung dibantah Pratikno melontarkan pernyataan bahwa reshuffle sudah tidak relevan. Pratikno mengatakan teguran keras Jokowi direspons positif jajaran kabinet.

"Tentunya dengan progres yang bagus ini, isu reshuffle tidak relevan sejauh bagus terus. Sekarang sudah bagus dan semoga bagus terus. Tentu saja kalau bagus terus, ya nggak ada isu, nggak relevan lagi reshuffle," ujar Pratikno menjawab pertanyaan wartawan seputar reshuffle.

Pernyataan ini diunggah di saluran YouTube Setpres, Senin (6/7). ● **mei**

# 2 Polhukam

## DPR Rapat Tertutup di Gedung KPK, Dinilai Langgar UU soal Transparansi

Menurut mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto, rapat tertutup dengan pihak lain menimbulkan pertanyaan di publik, apakah rezim KPK saat ini tengah bersekutu dan dibayangi kuasa kegelapan?

**JAKARTA (IM)** - Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto (BW) turut mengomentari rapat tertutup yang dilakukan DPR di Gedung Merah Putih KPK, pada Selasa 7 Juli 2020 kemarin.

Menurutnya, tindakan rapat tertutup itu potensial dikualifikasi telah melanggar prinsip penting di dalam UU KPK yang melanggar azas keterbukaan.

"Jika tindakan itu nekad dilakukan maka harus ada alasan yang sangat kuat yang harus dijelaskan secara terbuka kenapa harus dilakukan secara tertutup. Ini perlu dilakukan agar tidak terjadi fraud dan konflik kepentingan," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (8/7).

BW sapaan akrabnya, di gelarnya rapat tertutup semakin memberikan fakta yang

menjelaskan perbedaan yang sangat fundamental antara Pimpinan KPK saat ini dengan banyak periode kepemimpinan KPK sebelumnya yang nyaris menaburkan rapat tertutup seperti ini.

"Pertemuan secara tertutup bukan hanya menimbulkan tuduhan miring saja tapi pertanyaan di publik, apakah rezim KPK saat ini tengah bersekutu dan dibayangi kuasa kegelapan?," katanya.

BW mengharapkan agar KPK di bawah kepemimpinan Firi Cs menghentikan segala tindakan yang potensial dituntut sebagai "bersenda gurau" karena akan bisa kian menggerus kepercayaan publik pada lembaga KPK.

"Menyadari dan insyaf pada amanah yang berat yang harus ditanggung Pimpinan KPK, jauh lebih bermakna bagi upaya pemberantasan korupsi,"



### RAKER MENAKER DENGAN KOMISI IX

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyampaikan paparan pada rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/7). Rapat tersebut membahas perlindungan Pemerintah terhadap ketahanan struktur ketenagakerjaan dan pandemi Covid-19.

pungkasnya.

Sebelumnya, Komisi III DPR mengungkapkan alasan pihaknya menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK,

yakni karena ingin melihat kondisi Gedung hingga ruang tahanan KPK.

"Agenda hari ini adalah Komisi III melakukan kunjungan ke KPK sekaligus rapat pengawasan di gedung KPK. Pertama-tama karena ini ge-

dung baru, kami di periode yang sekarang belum pernah melihat kondisi gedung seperti apa, fasilitas seperti apa, kemudian ruang tahanan seperti apa," ujar Ketua Komisi III DPR, Herman Hery di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (7/7).

Herman mengungkapkan, tujuan lainnya pihaknya menyambangi KPK yakni untuk menguatkan kedua hubungan antar DPR dalam hal ini Komisi III dengan KPK.

"Kedua, tujuan dari rapat ini adalah bagaimana kemitraan antara Komisi III dan KPK untuk saling bergandengan tangan menguatkan lembaga KPK dalam urusan pemberantasan korupsi," jelasnya. ● **han**

## Kejagung: Ada 176.912 Sidang Online Tipidum Selama Pandemi Covid-19

**JAKARTA (IM)** - Kejaksanaan Agung (Kejagung) mengungkapkan, ada 176.912 persidangan online dalam perkara tindak pidana umum telah dilaksanakan selama pandemi Covid-19 terjadi di Tanah Air. Rekapitulasi data persidangan online tersebut terhitung sejak 30 Maret hingga 6 Juli 2020.

"Telah berlangsung 176.912 kali persidangan tindak pidana umum. Keberhasilan tersebut terjadi karena adanya koordinasi yang baik antara lembaga penegak hukum, juga penasihat hukum maupun masyarakat," ujar Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Kejagung, Sunarta dalam seminar virtual, Rabu (8/7).

Sunarta menjelaskan, persidangan online tersebut merujuk Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2020 pada tanggal 23 Maret tentang Kebijakan Pelaksanaan Tugas dan Penanganan Perkara Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Kemudian juga Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) Nomor B-049/A/SUJA/03/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan di tengah pandemi Covid 19.

Dari dua intruksi tersebut, Jaksa Agung Sanitair Burhanuddin memerintahkan para jaksa di seluruh Indonesia untuk melakukan sidang melalui teleconference. Kebijakan tersebut juga diperkuat dengan adanya perjanjian kerja sama (PKS) antara Mahkamah Agung, Kejagung dan Kementerian Hukum dan HAM.

Perjanjian tersebut menyepakati penyelenggaraan persidangan online untuk perkara tindak pidana dilaksanakan selama wabah Covid-19.

"Sehingga persidangan berjalan tanpa pertemuan atau tatap muka secara langsung," kata Sunarta.

Kendati demikian, Sunarta menjamin bahwa pelaksanaan persidangan online tersebut tetap memperhatikan prinsip-prinsip pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurutnya, KUHAP menjadi pegangan selama berjalannya persidangan online. "Walaupun tanpa tatap muka secara langsung para pihak, tetap memperhatikan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam KUHAP," tegas Sunarta. ● **han**



PT BATAVIA PROSPERINDO TRANS Tbk

### RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT. Batavia Prosperindo Trans Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu pada:

Hari/tanggal : Selasa, 7 Juli 2020.  
Tempat : Gedung Chase Plaza Lantai 12, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 21, Jakarta Selatan 12920.  
Pukul : 13.50 - 14.25 WIB.

Dengan Mata Acara sebagai berikut:

1. Pembahasan studi kelayakan tentang perubahan Kegiatan Usaha Perseroan.
2. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.
3. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

**Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :**

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :  
Direktur Utama : Tuan PAULUS HANDIGDO;  
Direktur (Independen) : Nyonya RIMA RUPITA;  
Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :  
Komisaris Utama : Tuan MARKUS DINARTO PRANOTO;

**Pemimpin Rapat:**

Rapat dipimpin oleh Tuan MARKUS DINARTO PRANOTO, selaku Komisaris Utama Perseroan.

**Kehadiran Pemegang Saham:**

- Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.408.047.900 saham atau 90,84 % dari 1.550.000.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:**

- Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

**Mekanisme Pengambilan Keputusan:**

- Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

**Hasil Pemungutan Suara:**

- Mata acara pertama sampai ketiga : Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju; Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);  
- Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.  
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

**Keputusan Rapat:**

1. Menerima dan menyetujui studi kelayakan tentang perubahan kegiatan usaha Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Laporan Studi Kelayakan Penambahan Kegiatan Usaha Penunjang (PT Batavia Prosperindo Trans Tbk), yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Iwan Bachron & Rekan tertanggal :
  - a. 28 Mei 2020 nomor 00002/IDRBDG/FSV/2020, yang telah dimuat dalam Keterbukaan Informasi yang telah diumumkan melalui situs web BEI dan situs web Perseroan, pada tanggal 29 Mei 2020;
  - b. 2 Juli 2020 nomor 00003/IDRBDG/FSV/2020, yang telah dimuat dalam Keterbukaan Informasi yang telah diumumkan melalui situs web BEI, situs web Perseroan, pada tanggal 3 Juli 2020.
2. a. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, dengan penambahan kegiatan usaha penunjang, dan Perseroan telah melakukan studi kelayakan sebagaimana ternyata dalam Laporan Studi Kelayakan Penambahan Kegiatan Usaha Penunjang (PT Batavia Prosperindo Trans Tbk), yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Iwan Bachron & Rekan tertanggal
  - a) 28 Mei 2020 nomor 00002/IDRBDG/FSV/2020, yang telah dimuat dalam Keterbukaan Informasi, yang telah diumumkan melalui situs web BEI dan situs web Perseroan, pada tanggal 29 Mei 2020;
  - b) 2 Juli 2020 nomor 00003/IDRBDG/FSV/2020, yang telah dimuat dalam Keterbukaan Informasi, yang telah diumumkan melalui situs web BEI, situs web Perseroan, pada tanggal 3 Juli 2020;
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan usaha dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menandatangani keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait penambahan kegiatan usaha penunjang dengan menggunakan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) berikut perubahan atau pembaharuannya (bila ada) atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. a. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat;
- b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menandatangani keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegakkan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undang di mana perlu.

Jakarta, 9 Juli 2020  
Direksi Perseroan



PT BATAVIA PROSPERINDO TRANS Tbk

### RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT. Batavia Prosperindo Trans Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu pada:

Hari/tanggal : Selasa, 7 Juli 2020.  
Tempat : Gedung Chase Plaza Lantai 12, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 21, Jakarta Selatan 12920.  
Pukul : 13.15 - 13.44 WIB.

Dengan Mata Acara sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019 termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2019, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2019;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2019;
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
4. Penentuan gaji, honorarium, dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

**Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :**

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :  
Direktur Utama : Tuan PAULUS HANDIGDO;  
Direktur (Independen) : Nyonya RIMA RUPITA;  
Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :  
Komisaris Utama : Tuan MARKUS DINARTO PRANOTO;

**Pemimpin Rapat:**

Rapat dipimpin oleh Tuan MARKUS DINARTO PRANOTO, selaku Komisaris Utama Perseroan.

**Kehadiran Pemegang Saham:**

- Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.408.047.900 saham atau 90,84 % dari 1.550.000.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:**

- Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

**Mekanisme Pengambilan Keputusan:**

- Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

**Hasil Pemungutan Suara:**

- Mata acara pertama sampai keempat : Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju; Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);  
- Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.  
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

**Keputusan Rapat:**

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2019, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2019, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2019 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
2. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2019 sebagai berikut :
  - a. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
  - b. Sebesar Rp. 50.000.000,00 disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
  - c. Sebesar Rp. 8.058.255.688,00 dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.
3. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya.
4. a. Menetapkan remunerasi berupa gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2020 sebesar sama dengan tahun buku sebelumnya (tahun buku 2019) dengan kenaikan tidak melebihi 25 % dari tahun buku 2019 dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya.
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi berupa gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi mana Perseroan.

Jakarta, 9 Juli 2020  
Direksi Perseroan

## 200-an Orang Terpapar Korona di Secapa AD Bandung

**BANDUNG (IM)** - Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jawa Barat (GTTP Jabar) mengungkap adanya temuan ratusan orang terkonfirmasi Covid-19 di Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat (Secapa AD) yang berada di Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung.

"Untuk jumlah yang terkena belum fix, perkiraan di atas 200 yang terpapar," ujar Juru Bicara GTTP Jabar Berli Hamdani di Gudang Bulog Jabar, Rabu (8/7).

Berli mengatakan, isolasi telah dilakukan di area Secapa AD. Sejumlah orang yang terpapar di institusi tersebut sebagian dirujuk ke

Rumah Sakit Dustira Kota Cimahi dan RSPAD Gatot Subroto Jakarta, sesuai dengan kondisi medisnya.

Sebagai antisipasi, tes masif akan dilakukan untuk memotong rantai penyebaran virus.

Tindakan itu akan diiringi dengan disinfeksi area dan penelusuran epidemiologis dari Dinkes Kota Bandung, Puskesmas dan tim GTTP Jabar.

"Sesuai arahan Pak Gubernur dalam rapat evaluasi gugus tugas selanjutnya akan kita lakukan masif tes, terhadap hampir 20-an lagi sekolah pendidikan kemiliteran yang ada di Provinsi Jabar," kata Berli.

Rencananya, GTTP Jabar juga akan melakukan tes masif dengan melakukan 10 ribu pemeriksaan. "Minggu ini kita menyelesaikan semua kluster atau potensi terjadinya kluster penyebaran COVID-19 di Jabar," kata Berli.

Selain Secapa, satu kluster industri di pabrik Unilever Kabupaten Bekasi juga tengah ditelusuri jejak penyebarannya. "Antisipasi kluster ini kami dari Provinsi Jabar melakukan identifikasi terhadap potensi penyebaran, baik melalui kluster atau penyebaran di masyarakat dengan pengesanan yang lebih masif lagi," ujar Berli. ● **mei**

## Peraih Adhi Makayasa Taruna TNI dan Polri Dilantik di Istana

**JAKARTA (IM)** - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan pelantikan 750 calon perwira TNI-Polri akan digelar secara daring lantaran pandemi virus korona (Covid-19). Pelantikan tersebut dijadwalkan digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (14/7).

"Saya kira jelas tadi pengarahannya mulai dari Kapolri, Panglima, dan Bapak Presiden memberikan pembekalan kepada calon prajurit

TNI dan Polri, tanggal 14 nanti dilantik di Istana Jakarta. Kami mohon doa restu semuanya agar bisa berjalan aman, lancar, dan tidak ada halangan berarti," kata Hadi di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Rabu (8/7).

Hadi menerangkan, Presiden Jokowi hanya akan menerima peraih Adhi Makayasa dari taruna TNI-Polri lulusan 2020 untuk dilantik di Istana yang berlangsung secara online

tersebut. Sementara para calon perwira lainnya akan dilantik di Akpol maupun akademi TNI.

"Perwakilan penerima Adhi Makayasa dan sumpah yang hadir dan lainnya dilaksanakan di Akademi TNI dan Akademi Kepolisian. Namun, semuanya sudah dipersiapkan dan dilaksanakan dengan baik karena mengingat masih dalam situasi pandemi Covid-19," tuturnya. ● **han**